

Penguatan Kapasitas bagi UMKM di Rukun Warga 07, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung

Yudhistira Anugerah Pratama ^{1*}  Arie Surya Gutama ¹,  Muhammad Fedryansyah ¹ 

¹ Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

* Korespondensi: yudhistira18001@mail.unpad.ac.id; Tel: +62-8782-126-1007

Diterima: 16 April 2023; Disetujui: 19 Juli 2023; Diterbitkan: 29 Juli 2029

Abstrak: Penguatan kapasitas merupakan rangkaian kegiatan bagi kelompok dengan pendampingan rutin, agar kelompok tersebut dapat berkembang menjadi kelembagaan yang aktif, partisipatif, serta berfungsi sesuai dengan peranannya di masyarakat. Penguatan kapasitas yang dikaji dalam artikel ini adalah penguatan kapasitas UMKM di Rukun Warga 07, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis penguatan kapasitas UMKM di RW 07 yang terdiri dari empat dimensi, yakni peran pemimpin lokal, pengembangan komunitas lokal, komunikasi vertikal dan horizontal, serta dukungan pihak luar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dimensi penguatan kapasitas UMKM di RW 07 sudah terimplementasi dengan baik, namun belum mencapai hasil maksimal. Tidak maksimalnya proses penguatan kapasitas tersebut terlihat dari belum adanya proses pengembangan komunitas lokal di RW 07. Hal tersebut berimplikasi terhadap terhambatnya pencapaian tujuan dari penguatan kapasitas UMKM di RW 07. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran bagi penguatan kapasitas UMKM di RW 07, diantaranya pemimpin lokal di RW 07 perlu menjaga dan meningkatkan perannya, komunitas lokal perlu dikembangkan, komunikasi vertikal dan horizontal perlu dijaga dan ditingkatkan, serta dukungan pihak luar perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selain itu, peneliti juga memberikan saran berupa pemberian pelatihan bagi UMKM di RW 07 agar proses penguatan kapasitas dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Kata kunci: penguatan kapasitas, pemimpin lokal, komunitas lokal, komunikasi, dukungan pihak luar, UMKM

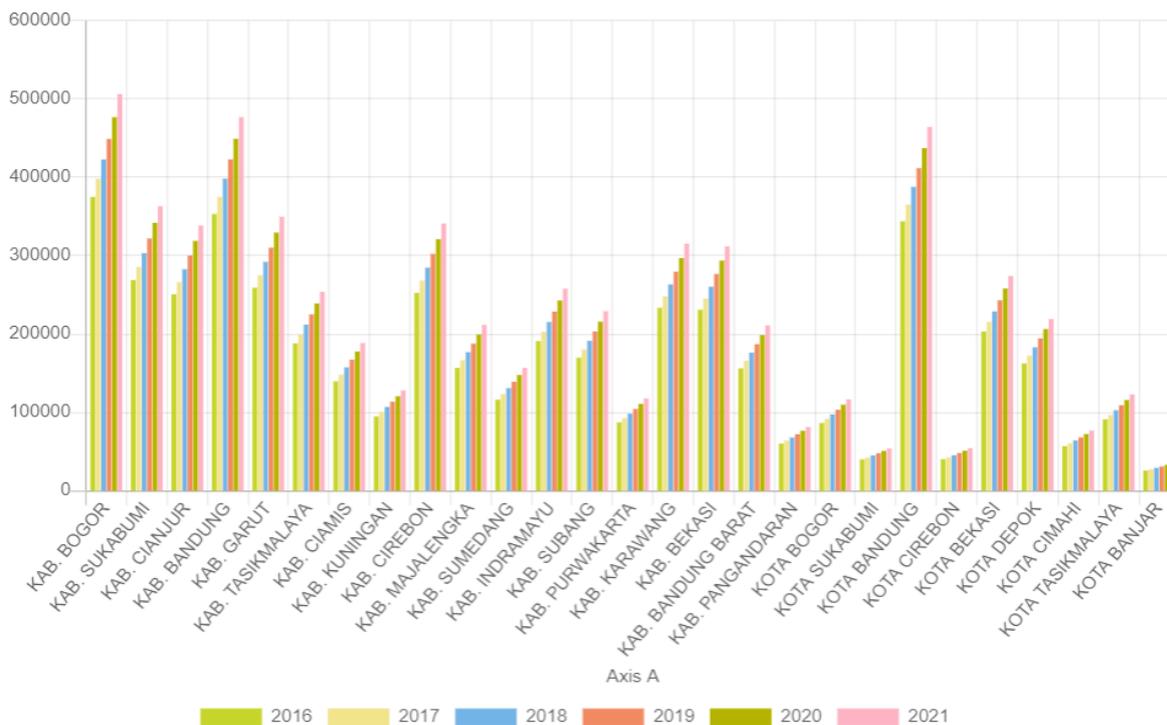
Abstract: Capacity strengthen is a series of activities for groups with regular assistance, so that the group can develop into an active, participatory, and functioning institution in accordance with its role in society. The capacity strengthen studied in this article is the strengthening of MSMEs capacity in Hamlet 07, Regol District, Bandung. The purpose of this research is to describe and analyze the strengthening of MSMEs capacity in Hamlet 07 which consists of four dimensions, namely the role of local leaders, local community development, vertical and horizontal communication, and external support. The method used is qualitative descriptive with observation, interview, and literature study techniques. The results showed that overall the dimension of capacity strengthen of MSMEs in Hamlet 07 has been well implemented, but has not achieved maximum results. The lack of capacity strengthen process can be seen from the absence of local community organization process in Hamlet 07. This has implications for hampering the achievement of the capacity strengthen's objectives of MSMEs in Hamlet 07. Based on the results, researchers provide suggestions for strengthening the capacity of MSMEs in Hamlet 07 is local leaders in Hamlet 07 need to maintain and improve their roles, local communities need to be developed, vertical and horizontal communication needs to be maintained and improved, and external support needs to be utilized as optimally as possible. In addition, researchers also provide suggestions in the form of providing training for MSMEs in Hamlet 07 so that the capacity building process can be implemented and provide benefits in a sustainable manner.

Keywords: capacity building, local leader, local community, communication, external support, MSMEs

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2021), jumlah UMKM di Provinsi Jawa Barat mencapai 2021 6.257.390 dan mengalami kenaikan sebesar 5,8% dari tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik jumlah UMKM di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten / kota.

Gambar 1 Jumlah UMKM Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten / Kota



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa jumlah UMKM terbanyak terdapat di Kabupaten Bogor. Namun terlihat pula bahwa jumlah UMKM di Kota Bandung memiliki jumlah yang banyak, yaitu 464.346 dan menduduki peringkat ketiga sebagai lokasi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Barat, sehingga Kota Bandung memiliki potensi UMKM yang cukup besar (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021). Oliveira, Almeida, Pauli, Moitinho, Fiorati, & Souza (2023) menjelaskan bahwa dengan melihat kondisi tersebut, UMKM di Kota Bandung perlu diberikan penguatan kapasitas agar dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. Dengan kata lain, penguatan kapasitas tersebut perlu merujuk pada inovasi-inovasi yang dapat membuat UMKM di Kota Bandung memiliki kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini. Terlebih lagi dengan adanya kondisi pandemik Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya, membuat UMKM mengalami penurunan kegiatan operasional secara signifikan (Oliveira, Almeida, Pauli, Moitinho, Fiorati, & Souza, 2023).

Harrell & Zakour dalam Pyles (2007), Pyles (2015), dan Pyles (2016) mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas bagi UMKM salah satunya ditinjau melalui munculnya berbagai komunitas lokal baik formal maupun informal. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa komunitas lokal baik formal maupun informal serta jaringan swadaya memiliki peran penting dalam proses pengorganisasian masyarakat. Adanya komunitas lokal informal dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam merespon perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman (Harrell & Zakour dalam Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016). Pengorganisasian yang dibangun dalam memperkuat kapasitas UMKM

adalah dengan melibatkan UMKM pada setiap pengambilan keputusan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan, contohnya lingkungan yang bersih, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta aspek sosial lain dalam pembangunan sosial yang merupakan aspek krusial, khususnya keputusan pemberian bantuan jangka panjang (Holzer & Lerman, 2006; Hughes, & Ketola, 2021; Zeren, Tan, Zhang, & Qiuying, 2023).

Pengelolaan penguatan kapasitas dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan membentuk kelompok pendamping yang bertanggung jawab dalam membantu UMKM dengan melakukan upaya dalam merespon perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman serta melibatkan berbagai pihak baik seperti lembaga non-pemerintah lokal dengan membuat rencana, alur koordinasi, serta komunikasi secara vertikal maupun horizontal antara masyarakat dengan pihak lain. Aktivitas ini akan membentuk suatu sistem yang didalamnya memuat rencana kebijakan, anggaran, dan program pelaksanaan pemberdayaan melalui penguatan kapasitas (Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016).

Penguatan kapasitas bagi UMKM menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. Penguatan kapasitas bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keberlanjutan kegiatan operasional mereka. Berikut adalah hal-hal yang mendasari pentingnya penguatan kapasitas bagi UMKM dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman menurut Elshater & Abusaada (2023) dan Fleury (2023):

- a. Meningkatkan daya saing
Dalam situasi yang dinamis, UMKM harus mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif untuk tetap bersaing. Penguatan kapasitas dapat membantu UMKM untuk mengembangkan kemampuan strategi dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing.
- b. Memperoleh sumber daya yang lebih baik
Dengan penguatan kapasitas, UMKM dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait dan memperoleh sumber daya yang lebih baik seperti bahan baku, pembiayaan, dan keterampilan tenaga kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan UMKM.
- c. Memperhatikan lingkungan yang lebih luas
Dalam era globalisasi, UMKM harus memahami dinamika lingkungan yang lebih luas. Dengan penguatan kapasitas, UMKM dapat meningkatkan kemampuan untuk memantau dan memahami *trend* yang baru dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi.
- d. Meningkatkan kinerja finansial
Penguatan kapasitas dapat membantu UMKM mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja finansial. Misalnya, dengan memperbaiki sistem akuntansi dan pengendalian keuangan, UMKM dapat mengelola biaya dengan lebih efisien.
- e. Meningkatkan keterlibatan anggota
Penguatan kapasitas bisa meningkatkan keterlibatan anggota dalam kegiatan operasional UMKM. Dengan memperkenalkan pendekatan manajemen yang baru dan memberikan pelatihan keterampilan, UMKM dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota pada saat yang sama.

Dari hasil penelitian terdahulu juga ditemukan masih sedikitnya penelitian yang membahas secara khusus perihal pengaruh penguatan kapasitas bagi UMKM. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajibade & Siders (2021); Rahm & Gonsalves (2023); Sawyer, Grieb, Long, Tilchin, Clark, Greenbaum, & Jennings (2023) mengenai pemberdayaan bagi UMKM dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan saat pandemik Covid-19. Namun konsep dan hasil dari penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai penguatan kapasitas UMKM dalam merespon perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman.

Adapun informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi awal bahwa RW 07 memiliki mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan penjual jasa, dengan kata lain sebagian besar penduduk RW 07 bekerja di sektor informal. Hal tersebut terlihat dari banyak ditemui UMKM di

wilayah RW 07, seperti warung nasi, pedagang bakso, pedagang jus, pedagang bubur, pedagang aneka minuman, penjahit, supir rental, tukang *laundry*, tukang las, dan tukang listrik. Sementara informasi dari Profil RW 07 (2022) menyebutkan bahwa penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 133 orang dan penduduk yang bekerja di sektor jasa berjumlah 105 orang.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, RW 07 memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak, sehingga penelitian mengenai penguatan kapasitas diharapkan dapat membantu pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman, salah satunya dampak dari pandemik Covid-19 yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, bila dikaitkan dengan pemaparan sebelumnya, Kota Bandung merupakan salah satu lokasi dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Barat, sehingga hal tersebut menjadi pendukung lain yang membuat penelitian mengenai penguatan kapasitas UMKM memiliki urgensi yang tinggi.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif yang berpedoman pada Martha & Kresno (2016) dengan informan adalah pelaku UMKM di RW 07, baik yang berasal dari sektor pedagang maupun yang berasal dari sektor jasa. Peneliti menggunakan teknik *purposive*, agar proses penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Teknik *purposive* yang digunakan adalah peneliti memilih pihak-pihak seperti Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Sekretaris Paguyuban UMKM RW 07, Bendahara Paguyuban UMKM RW 07, serta sepuluh orang perwakilan dari setiap UMKM sekaligus menjadi anggota dari Paguyuban UMKM RW 07 untuk menjadi informan.

Peneliti memilih sebab pihak-pihak tersebut memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memiliki kekuatan yang dapat membantu peneliti dalam menyampaikan gagasan dan saran kepada pelaku UMKM lainnya ketika penelitian selesai. Selain kepada pihak-pihak tersebut, peneliti juga memilih informan yang berasal dari lembaga kemasyarakatan seperti Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, Ketua Kecamatan Regol, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang juga memiliki informasi mumpuni bagi kebutuhan penelitian.

Pengkajian dilakukan melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara mendalam kepada informan, catatan penelitian, dan dokumentasi lapangan. Sementara data sekunder yang digunakan berupa profil dan data kependudukan di RW 07. Selain menggunakan data primer dan sekunder, artikel ini juga menggunakan publikasi ilmiah sebagai sumber literatur yang berasal dari artikel, buku, skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki pembahasan mengenai penguatan kapasitas UMKM. Literatur tersebut digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengkajian tentang penguatan kapasitas yang bertujuan untuk membantu UMKM untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta mampu beradaptasi dalam perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman.

3. Hasil

Rukun Warga 07 merupakan salah satu rukun warga yang berada di Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Rukun Warga 07 memiliki luas enam hektar dengan batas administrasi bagian Utara berbatasan dengan Jalan Ibu Inggit Ganarsih, bagian Selatan berbatasan dengan SMP Negeri 11 Bandung, bagian Barat berbatasan dengan Jalan Mohammad Toha, dan bagian Timur berbatasan dengan Gang Tengku. Rukun Warga 07 memiliki lima RT, yaitu RT 01 memiliki luas 0,7 hektar, RT 02 memiliki luas 3 hektar, RT 03 memiliki luas 0,5 hektar, RT 04 memiliki luas 0,9 hektar, dan RT 05 memiliki luas 0,9 hektar. Jumlah penduduk Rukun Warga 07 sebanyak 1.304 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 640 jiwa, dan perempuan sebanyak 664 jiwa. Lalu, jumlah kepala keluarga di Rukun Warga 07 terdiri dari 400 kepala keluarga.

Pendidikan penduduk di RW 07 beragam, mulai dari yang tidak bersekolah sebanyak 61 orang, tidak tamat SD sebanyak 4 orang, belum tamat SD sebanyak 85 orang, tamatan SD sebanyak 56 orang, untuk tamatan SMP atau sederajatnya sebanyak 123 orang, untuk tamatan SMA atau sederajatnya

sebanyak 660 orang, untuk lulusan akademi atau sederajatnya sebanyak 107 orang, dan untuk lulusan perguruan tinggi atau universitas sebanyak 208 orang. Berdasarkan hasil observasi, RW 07 juga memiliki penduduk mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan penjual jasa. Hal ini dapat terlihat dari berbagai jenis UMKM di wilayah RW 07, seperti warung nasi, pedagang bakso, pedagang jus, pedagang bubur, pedagang aneka minuman, penjahit, *laundry*, supir rental, dan tukang listrik. Untuk jumlah pedagang di RW 07 sendiri berjumlah 114 orang, yang berada di sektor jasa berjumlah 82 orang, dan untuk buruh berjumlah 118 orang.

Gambar 2 UMKM di Rukun Warga 07, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung



Sumber: Hasil penelitian, 2023

Bila dilihat dari jumlah UMKM di RW 07, penguatan kapasitas menjadi hal yang penting, terlebih lagi penguatan kapasitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dapat membantu UMKM di RW 07 dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari adanya perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. Penguatan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM di RW 07 dalam hal manajemen, operasional, pemasaran, dan keuangan sehingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam persaingan. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan produk dan layanan, serta peningkatan akses ke sumber daya finansial. Tujuan dari penguatan kapasitas adalah untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Dalam jangka waktu panjang, hal ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan usaha serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

3.1. Peran Pemimpin Lokal

Sebagai salah satu agen perubahan yang efektif dalam mendorong penguatan kapasitas UMKM, pemimpin lokal dapat memainkan peran strategisnya. Berdasarkan hasil penelitian, Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol telah menerapkan perannya sebagai salah satu agen perubahan bagi UMKM di Rukun Warga 07. Berikut upaya yang dilakukan Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol dalam rangka menguatkan kapasitas UMKM di RW 07:

- a. Meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap pendanaan
Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol berupaya memfasilitasi aksesibilitas UMKM di RW 07 terhadap permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi serta stabilitas finansialnya. Tidak hanya itu, Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol juga berupaya dalam mengalokasikan anggaran untuk aktivitas khusus yang dirancang untuk membantu pengusaha milik lokal serta memberikan jejaring bagi UMKM di RW 07 untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta.
- b. Menciptakan lingkungan operasional yang kondusif
Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol juga berupaya menciptakan lingkungan operasional yang kondusif bagi UMKM di RW 07. Meskipun tidak dilakukan secara rutin, tetapi Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol mulai berupaya untuk membuka aksesibilitas pelayanan publik, yaitu kepada Jasaboga. Namun, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol belum memfasilitasi kemitraan antara UMKM di RW 07 dengan lembaga pendukung skala kecil, seperti asosiasi profesional dan pusat inkubasi bisnis.
- c. Memberikan pelatihan dan mengembangkan keterampilan
Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol juga berupaya memberikan pelatihan dan mendukung pengembangan keterampilan bagi UMKM di RW 07 dan anggotanya. Hal ini dilakukan agar UMKM di RW 07 dan anggota dapat meningkatkan efisiensi operasional maupun kualitas produk atau layanan yang diberikan. Namun, terkadang kegiatan pelatihan tersebut tidak melibatkan partisipasi Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol secara utuh dan diselenggarakan secara terpisah, sehingga pelatihan yang dilakukan belum terlaksana secara optimal dan belum sesuai kebutuhan UMKM di RW 07.
- d. Menjalin jaringan keberlanjutan
Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol juga berupaya menciptakan jaringan yang berkelanjutan untuk menghubungkan UMKM di RW 07 dengan produsen, pemasar, serta rekan bisnis lokal. Jaringan ini dibentuk agar memungkinkan adanya interaksi antar pelaku UMKM di RW 07, terutama yang berkaitan dengan tukar pengetahuan dan pengalaman, membuka aksesibilitas, serta memfasilitasi pertumbuhan UMKM dan inovasi.

Kemudian, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa peran pemimpin lokal sangat penting dalam mendorong penguatan kapasitas UMKM di RW 07, sebab hal ini akan berimplikasi pada peningkatan pengembangan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pemimpin lokal juga dapat memberikan manfaat dengan berupaya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UMKM di RW 07 mengenai pemasaran, manajemen keuangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan UMKM di RW 07. Pemimpin lokal juga dapat membantu akses ke pasar yang lebih luas, menjadi jembatan komunikasi antara UMKM di RW 07 dengan instansi pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan, membantu meningkatkan produksi UMKM di RW 07 dan menciptakan lapangan kerja baru, serta membantu UMKM di RW 07 mencapai kemandirian ekonomi yang menjadi bagian integral dari perekonomian lokal dan nasional. Namun seluruh upaya tersebut masih dalam proses perencanaan dan belum terimplementasi secara optimal, sehingga penguatan kapasitas UMKM di RW 07 yang ditinjau berdasarkan peran pemimpin lokal belum tercapai secara maksimal.

3.2. Pengembangan Komunitas Lokal

Pengembangan komunitas lokal dapat menjadi salah satu strategi dalam penguatan kapasitas bagi UMKM. Pengembangan komunitas lokal dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian, komunitas lokal yang berada di RW 07 seperti Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM belum dikembangkan secara menyeluruh. Tidak hanya belum adanya pengembangan secara menyeluruh, tetapi komunitas lokal tersebut juga masih menjalankan perannya masing-masing, sehingga proses kolaborasi antar komunitas belum terjalin dan hal ini berimplikasi terhadap penguatan kapasitas UMKM di RW 07 yang menjadi terhambat.

Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM sebagai komunitas lokal belum melakukan kerja sama dengan UMKM di RW 07 dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau jasa, meningkatkan efisiensi biaya produksi, serta memperluas jangkauan pasar. Jaringan yang terbentuk hanya sebatas koordinasi yang bersifat sementara, misalnya ketika ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan saja Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM melakukan kerja sama dengan UMKM di RW 07. Sementara pada hari-hari biasa, komunitas lokal tersebut tidak melakukan koordinasi dan kerja sama, padahal dengan bekerja sama, UMKM di RW 07 juga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan komunitas lokal dan juga kegiatan operasional UMKM itu sendiri.

Pengembangan komunitas lokal juga dapat memberikan motivasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam menghasilkan produk berkualitas serta meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sayangnya, motivasi dan pelatihan bagi UMKM di RW 07 masih belum terealisasi dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Hal ini disebabkan belum adanya proses pengembangan komunitas lokal yang mendukung. Pengembangan komunitas lokal seperti Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM masih dilakukan secara mandiri, artinya komunitas lokal ini masih mengutamakan pengembangan dan kepentingan masing-masing. Selain itu, pengembangan secara terpisah membuat sebagian komunitas lokal mengalami keterhambatan pengembangan, sebab belum adanya kepekaan dari komunitas lain untuk membantu dan keterbatasan sumber daya.

Komunitas lokal dapat membantu UMKM untuk mengembangkan saluran distribusi dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, UMKM dapat bekerja sama dengan toko atau pengecer lokal atau bahkan membuat kanal distribusi sendiri melalui penjualan *online*. Tetapi, berdasarkan hasil penelitian, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM belum mengembangkan saluran distribusi tersebut bagi UMKM di RW 07. Sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya, komunitas lokal tersebut masih mengutamakan pengembangan dan kepentingan masing-masing, sehingga proses penguatan kapasitas UMKM di RW 07 juga menjadi terhambat.

Dalam hal promosi, pengembangan komunitas lokal juga dapat membantu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM yang dinaungi oleh komunitas tersebut. Dengan citra yang positif, UMKM dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk mereka. Dalam hal ini, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM juga belum membantu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM di RW 07, sebab komunitas lokal masih mengutamakan pengembangan dan kepentingan masing-masing, sedangkan untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat, perlu adanya kolaborasi terpadu antar komunitas lokal tersebut.

Pengembangan komunitas lokal dapat mencakup kolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses ke informasi mengenai peluang bisnis dan sumber daya melalui pelatihan dan pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM di RW 07 memperoleh bantuan dari pihak lain, namun tidak dalam intensitas yang tinggi. Maksudnya, bantuan tersebut masih bersifat sementara dan

jarang, sehingga manfaat yang diperoleh juga tidak memberikan efek yang signifikan. Akibat dari masih adanya pengembangan dan kepentingan masing-masing, komunitas lokal di RW 07 belum mampu untuk menciptakan jejaring yang lebih luas untuk memperoleh bantuan dari pihak lain untuk UMKM di RW 07 yang lebih bersifat berkelanjutan dan memiliki intensitas tinggi.

3.3. Komunikasi Vertikal dan Horizontal

Komunikasi vertikal dan horizontal menjadi hal yang penting dalam penguatan kapasitas bagi UMKM. Komunikasi vertikal adalah hubungan antara pihak-pihak yang berada di tingkat atas dan pihak-pihak yang berada di tingkat bawah. Sementara komunikasi horizontal adalah hubungan antar pihak dalam suatu lingkungan dengan tingkat yang sejajar. Berdasarkan hasil penelitian, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM secara rutin melakukan komunikasi vertikal dengan pihak-pihak yang berasal dari pemerintah lokal, seperti Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol. Tidak hanya itu, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM juga selalu melakukan komunikasi horizontal dengan antar anggota dari komunitas lokal maupun masyarakat lokal.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa komunikasi vertikal yang dilakukan oleh Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM sebagai komunitas lokal dapat membantu UMKM di RW 07 untuk memperoleh informasi dan arahan yang jelas dari pihak-pihak yang berada di tingkat atas mengenai strategi, tujuan, dan kebijakan. Informasi ini akan membantu UMKM di RW 07 untuk memahami secara lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan pasar dengan cakupan yang lebih luas, sehingga memungkinkan UMKM di RW 07 untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan atau membuat produk dengan kualitas yang lebih baik.

Sementara itu, komunikasi horizontal yang dilakukan oleh Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM dengan antar anggota dari komunitas lokal maupun masyarakat lokal juga dapat membantu UMKM di RW 07 untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang saling mendukung dalam menjalankan kegiatan operasional mereka. Dengan komunikasi horizontal yang baik, UMKM di RW 07 dapat memperkuat keterampilan dan pengetahuan tertentu yang kurang terkait dengan aktivitas inti mereka, seperti pemasaran, keuangan, atau teknologi informasi. Selain itu, komunikasi horizontal juga memungkinkan UMKM di RW 07 untuk membangun hubungan kerja yang baik dan saling mendukung dengan mitra mereka, seperti pemasok, kontraktor, atau pelanggan, sehingga membantu UMKM di RW 07 menghindari konflik dan membangun kerjasama yang bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam rangka memperkuat komunikasi vertikal dan horizontal, UMKM di RW 07 telah berupaya dengan melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan keterampilan komunikasi anggota, memperbaiki saluran komunikasi internal, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan yang penting. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa apabila komunikasi vertikal dan horizontal yang mereka lakukan dapat diperkuat, hal ini akan membuat UMKM di RW 07 lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan bisnis mereka serta memperkuat kapasitas untuk bersaing di pasar yang kompetitif.

3.4. Dukungan Pihak Luar

Penguatan kapasitas bagi UMKM menjadi suatu hal yang penting, terutama sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan dalam menghadapi persaingan. Pada umumnya, dukungan dapat diberikan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi swasta, maupun lembaga akademik. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM di RW 07 juga telah mendapatkan berbagai dukungan dari pihak luar, seperti pemerintah lokal, lembaga akademik, dan komunitas lokal. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai dukungan yang diberikan oleh pihak luar dalam penguatan kapasitas bagi UMKM di RW 07:

a. Pemerintah lokal

Pemerintah lokal seperti Ketua Kelurahan Ciateul dan Ketua Kecamatan Regol memberikan dukungan berupa penyediaan bantuan tunai dan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas UMKM di RW 07, seperti pelatihan, pendanaan, sertifikasi, dan akses pasar yang luas. Namun dukungan pemerintah lokal tersebut terkadang belum sesuai dengan kebutuhan penguatan kapasitas UMKM di RW 07 itu sendiri. Hal ini menjadi wajar, sebab pada dasarnya dukungan pihak luar, termasuk pemerintah lokal, hanya menjadi faktor pendukung eksternal saja, bukan menjadi katalisator perubahan.

b. Organisasi swasta

Organisasi seperti perusahaan-perusahaan swasta juga dalam beberapa kesempatan telah memberikan dukungan kepada UMKM di RW 07, seperti penyediaan bantuan teknis pelatihan, asistensi dalam pengelolaan kegiatan operasional, dan fasilitas akses ke jaringan pasar yang lebih luas. Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta tersebut juga dalam beberapa kesempatan membantu UMKM di RW 07 dalam memperoleh standar keamanan dan mutu produk yang dibutuhkan untuk memasarkan produk mereka.

c. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan seperti Jasaboga juga telah berupaya menjadi sumber pendanaan bagi UMKM di RW 07. Jasaboga memberikan pinjaman, kredit modal kerja, dan memfasilitasi akses UMKM di RW 07 ke pasar keuangan dan perbankan. Namun, akibat masih adanya fokus terhadap masing-masing kepentingan dari komunitas lokal, Jasaboga akhirnya memberhentikan sumber pendanaan bagi UMKM di RW 07 dengan alasan menghindari ketidaktepatan sasaran dari bantuan yang diberikannya.

d. Lembaga akademik

Lembaga akademik juga telah memberikan dukungan seperti kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penguatan kapasitas UMKM di RW 07. Lembaga akademik yang dimaksud diantaranya adalah Universitas Padjadjaran dan Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, mereka juga menyediakan informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan bisnis secara efektif, meningkatkan kualitas produk, dan memasarkan produk dan layanan. Universitas Padjadjaran dan Universitas Pendidikan Indonesia juga telah melakukan riset yang menyangkut aspek perdagangan dan pemasaran, sehingga UMKM di RW 07 dapat memperoleh wawasan tentang *trend* dan peluang pasar.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa dukungan dari berbagai pihak yang telah disebutkan juga memberikan dampak bagi UMKM di RW 07 seperti pengembangan keahlian dan pengetahuan bisnis, sehingga UMKM di RW 07 dapat memperbaiki kualitas produk, meningkatkan pemasaran, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Adapun dukungan dari berbagai pihak tersebut juga membuka peluang bagi UMKM di RW 07 untuk terkoneksi dengan berbagai perusahaan dan membangun kemitraan strategis dengan UMKM di lokasi lain, sehingga UMKM di RW 07 dapat memperluas jaringan dan meningkatkan akses pasar. Dukungan tersebut juga memberikan reputasi yang baik bagi UMKM di RW 07. Meskipun tidak signifikan, tetapi UMKM di RW 07 menjadi lebih mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, adanya peningkatan reputasi, UMKM di RW 07 juga dapat meningkatkan skala bisnis, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula.

4. Pembahasan

Harrell & Zakour dalam Pyles (2007), Pyles (2015), dan Pyles (2016) mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas pada pengorganisasian, salah satunya ditinjau melalui munculnya berbagai komunitas lokal baik formal maupun informal. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa komunitas lokal informal dan jaringan swadaya memiliki peranan penting dalam proses pengorganisasian (Harrell & Zakour dalam Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016). Komunitas lokal informal pada umumnya dikelola

oleh relawan dan dapat menyediakan bantuan secara mandiri ataupun gotong royong. Jaringan komunitas lokal formal terkadang mengabaikan sumber-sumber penting yang dimiliki oleh relawan lokal. Padahal, adanya komunitas lokal informal dapat meningkatkan partisipasi kelompok dalam merespon kondisi, terutama kelompok yang terisolasi atau terpinggirkan (Harrell & Zakour dalam Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016). Salah satu bentuk penguatan kapasitas masyarakat lokal adalah memberikan kesempatan pada kelompok, seperti pemimpin lokal untuk terlibat proses koordinasi dengan pemerintah dalam pemberian layanan. Murphy & Cunningham (2003) dan Sampaio, Ferreira, Ludwig, & Padial (2023) menambahkan pengorganisasian yang menekankan pada kepemimpinan lokal, termasuk didalamnya kelompok rentan serta berfokus pada pemberdayaan, dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, termasuk UMKM agar dapat mengorganisasikan dirinya dalam menyelesaikan masalah bersama.

Pada dasarnya, perubahan lingkungan dan perkembangan zaman dapat membuat masyarakat bergantung pada sumber daya lokal yang dimilikinya, sehingga mempercepat masyarakat, termasuk UMKM untuk beradaptasi dari dampak perubahan lingkungan dan perkembangan zaman tersebut. Minkler, Wallerstein, & Wilson (2008) dan Wright, Rosser, & Zwart (2021) mengidentifikasi hubungan antara pelibatan masyarakat dan adaptasi secara mental melalui aktivitas pengorganisasian yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk menentukan nasibnya guna merubah status korban pada masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dalam psikologis positif masyarakat (Engel-Di Mauro & Martin, 2021; Collins, Dolata, Pike, & Sehgal, 2023). Sebaliknya, ketergantungan sumber daya eksternal dapat menghambat pemulihan, sebab terdapat hambatan pada penggunaan sumber daya lokal (Minkler, Wallerstein, & Wilson, 2008).

Pengorganisasian yang dibangun dalam memperkuat kapasitas masyarakat lokal adalah dengan melibatkan masyarakat lokal pada setiap pengambilan keputusan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan, contohnya lingkungan yang bersih, pekerjaan yang layak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta aspek sosial lain dalam pembangunan sosial yang merupakan aspek krusial (Holzer & Lerman, 2006; Hughes & Ketola, 2021; Zeren, Tan, Zhang, & Qiuying, 2023). Selanjutnya, penting pula untuk melakukan klarifikasi pengorganisasian yang ada saat ini bahwa terdapat perbedaan antara pengelolaan pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas dan pengelolaan aktivitas pengorganisasian yang dilakukan pada proses advokasi kebijakan dan program terkait dengan kebutuhan revitalisasi masyarakat (Pyles, 2007). Selain itu, pembentukan komunitas lokal harus melibatkan seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok rentan, berfokus pada aktivitas transformasi elit politik, serta merubah kebijakan yang cenderung tidak sesuai (Pyles, 2007).

Pengelolaan pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan membentuk satuan tugas khusus yang bertanggung jawab dalam membantu masyarakat dengan melakukan upaya pemulihan serta melibatkan berbagai pihak baik seperti lembaga non-pemerintah lokal dengan membuat rencana, alur koordinasi, serta komunikasi secara vertikal maupun horizontal antara masyarakat dengan pihak lain (Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016). Aktivitas ini akan membentuk suatu sistem yang didalamnya memuat rencana kebijakan, anggaran, dan program pelaksanaan rehabilitasi. Selain itu, pemimpin lokal yang berasal dari organisasi lokal merupakan pihak yang harus dilibatkan pada pengelolaan pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kapasitas bagi masyarakat (Apuan, 1988; Beckwith & Lopez, 2011; Wynia, Dalmer, Linden, Radha, & Gillett, 2023).

4.1. Peran Pemimpin Lokal

Penguatan kapasitas masyarakat lokal merupakan aktivitas yang mampu meningkatkan kemampuan serta mengembangkan UMKM dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, suatu wilayah juga memiliki potensi muncul pemimpin lokal dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh UMKM. Pemimpin lokal tersebut dapat menyampaikan ide dan gagasan yang berpedoman pada pengumpulan data, sebab pemimpin lokal merupakan salah satu aktor yang dapat menjadi penggerak bagi komunitas lokal dan UMKM dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dampak dari adanya perubahan kondisi

lingkungan dan perkembangan zaman (Dunham, 1965; Siddiqui, 1997; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Bane, Coffin, & Thiemann, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin lokal di RW 07 seperti Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol belum berusaha mencari serta mendapatkan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu bagi UMKM di RW 07 dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman yang terjadi. Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol pada dasarnya sudah memiliki pemahaman terhadap proses identifikasi penyelesaian masalah. Hal ini berkaitan dengan struktur kelembagaan, politik, dan sosial yang ada pada masing-masing komunitas dan pemimpin lokal itu sendiri. Setelah strategi dan rencana tindakan dibuat, Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol mengajak UMKM di RW 07 untuk menyelesaikan masalah berdasarkan strategi dan rencana tindakan yang telah dibuat sebelumnya. Kesetupaduan yang ada akan menjadi kekuatan dasar dari UMKM di RW 07 dalam menjaga kondisi serta pengembangan pada penyelesaian masalah lainnya. Terakhir, Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol harus mempunyai kemauan untuk meninjau kembali serta mengevaluasi keputusan sebelumnya (Dunham, 1965; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Batsleer, Rowley, & Lüküslü, 2022; Sojoyner, 2022).

Sebagai agen perubahan yang efektif dalam mendorong penguatan kapasitas UMKM, pemimpin lokal juga dapat memainkan peran strategis. Dengan peran strategis pemimpin lokal dalam penguatan kapasitas UMKM, diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan potensi bisnis mereka, sehingga dapat berkembang dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Berdasarkan hasil penelitian, Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol telah menerapkan perannya sebagai salah satu agen perubahan bagi UMKM di Rukun Warga 07. Meskipun peran-peran dari pemimpin lokal tersebut belum terimplementasi secara optimal, namun sudah terdapat upaya pemimpin lokal untuk menguatkan kapasitas UMKM di RW 07. Dengan begitu, peran pemimpin lokal tersebut dapat ditingkatkan dan dikembangkan agar menjadi lebih baik dan dapat membantu UMKM di RW 07 untuk memiliki kapasitas dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman (Dunham, 1965; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Srivastava & Kumar, 2023).

Selanjutnya, pemimpin lokal dapat meningkatkan fasilitas aksesibilitas UMKM di RW 07 terhadap permodalan, dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi serta stabilitas finansial. Hal tersebut dapat didukung oleh pemerintah lokal yang dapat mengalokasikan anggaran untuk program khusus yang dirancang untuk membantu pengusaha milik lokal, serta memberikan izin untuk membangun relasi kemitraan dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pemimpin lokal juga perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM di RW 07 secara berkala, sehingga UMKM di RW 07 dapat efektif meningkatkan kualitas dalam memproduksi barang atau jasanya (Dunham, 1965; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016).

Selain itu, pemimpin lokal juga bisa memfasilitasi kemitraan antara UMKM di RW 07 dan lembaga pendukung bisnis skala kecil, seperti asosiasi profesional dan pusat inkubasi bisnis. Pemimpin lokal dapat memberikan pelatihan dan mendukung pengembangan keterampilan bagi pengusaha lokal yang dapat berimplikasi terhadap peningkatan efisiensi operasional maupun kualitas produk atau layanan yang diberikan. Kemudian, pemimpin lokal dan pemerintah lokal perlu menciptakan jaringan yang berkelanjutan untuk menghubungkan UMKM di RW 07 dengan produsen, pemasar, serta rekan bisnis. Jaringan ini akan memungkinkan pengusaha lokal berinteraksi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman, membuka aksesibilitas pasar serta memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan inovasi (Ross, 1955; Ross, 1967; Rubin, 1986; John, 2022; Leathwick & Byrom, 2023).

Maka dari itu, peran pemimpin lokal menjadi salah satu hal yang penting dalam mendorong penguatan kapasitas UMKM, sebab hal ini akan berimplikasi terhadap pengembangan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemimpin lokal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat meningkatkan akses UMKM terhadap terhadap

sumber-sumber dana dan pengembangan modal melalui program-program pemerintah dan lembaga keuangan, memberikan pendidikan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan agar UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan bisnis mereka, serta membantu UMKM agar dapat masuk ke pasar secara luas dan berkembang melalui program-program kolaborasi dengan pasar lokal atau pemangku kepentingan lainnya (Ross, 1955; Ross, 1967; Rubin, 1986; John, 2022; Leathwick & Byrom, 2023).

Tentunya peran pemimpin lokal juga perlu diarahkan kepada penyediaan infrastruktur dan layanan pendukung seperti komunikasi, transportasi, fasilitas produksi, dan teknologi bagi UMKM. Dengan begitu, UMKM dapat dengan mudah mengembangkan kemitraan strategis untuk kepentingan bersama pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pasar lokal. Kepentingan yang dimaksud adalah meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (termasuk UMKM) menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, dengan peran strategis pemimpin lokal dalam penguatan kapasitas UMKM, diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan potensi bisnis mereka sehingga dapat berkembang dan memiliki daya saing (Ross, 1955; Ross, 1967; Rubin, 1986; John, 2022; Leathwick & Byrom, 2023).

4.2. Pengembangan Komunitas Lokal

Proses selanjutnya dari penguatan kapasitas adalah munculnya komunitas lokal. Komunitas lokal dapat melakukan aktivitas pengorganisasian bagi UMKM melalui kegiatan penguatan kapasitas dan meningkatkan kesejahteraan UMKM. Kemudian, komunitas lokal berperan membentuk perencanaan dan pembentukan pola pemeliharaan, pendanaan, sistem informasi hidrologi, dan pembuatan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh UMKM akibat dari perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. Kapasitas masyarakat lokal yang dimaksud ditunjukkan berdasarkan perkembangan komunitas yang dicetuskan oleh pemimpin lokal di suatu wilayah. Perkembangan komunitas lokal umumnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan UMKM terhadap penyelesaian masalah. Berdasarkan hal tersebut, komunitas lokal perlu memiliki kemampuan untuk menggerakkan UMKM agar saling membantu, mengingatkan, dan bertindak sesuai dengan prioritas masalah yang dihadapi. Dalam melaksanakan aktivitas pertolongan dan penyelesaian masalah, anggota komunitas lokal beserta UMKM dapat melakukan koordinasi dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman, salah satunya melalui pelatihan bagi UMKM (Ross, 1955; Ross, 1967; Rubin, 1986; Dizon, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan komunitas lokal di RW 07 belum mencapai hasil yang maksimal. Pencapaian yang belum dimaksimalkan dalam pengembangan komunitas lokal dapat dilihat dari segmentasi yang dilakukan oleh mereka mengenai peran komunitas lokal itu sendiri. Selain itu, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM masih terfokus pada kepentingan masing-masing, sehingga proses kerjasama antar masyarakat belum terjalin dan hal ini berdampak pada tertundanya peningkatan kapasitas UMKM di RW 07. Kemudian, pembinaan dan pelatihan UMKM di RW 07 juga tidak dilaksanakan dengan baik dan komprehensif, hal ini disebabkan kurangnya dukungan proses pengembangan komunitas lokal. Pengembangan komunitas lokal seperti Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM masih dilakukan secara mandiri, artinya komunitas lokal ini masih mengutamakan pengembangan dan kepentingannya sendiri. Pengembangan yang dilakukan juga menyebabkan keterlambatan pengembangan di beberapa komunitas lokal lain, sebab adanya keengganan komunitas lain untuk membantu dan sumber daya yang terbatas (Ross, 1955; Ross, 1967; Rubin, 1986; Vandeventer, 2004; Suriadi, 2005).

Komunitas lokal dapat membantu UMKM mengembangkan jalur distribusi dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, UMKM dapat bekerja sama dengan toko atau membuat saluran distribusi sendiri melalui penjualan *online*. Namun, hasil penelitian menunjukkan Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM tidak mengembangkan jalur distribusi bagi UMKM di RW 07. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, komunitas lokal ini terus mengembangkan prioritasnya masing-masing, sehingga proses penguatan

kapasitas UMKM di RW 07 menjadi lebih sulit. Dalam promosi, mengembangkan komunitas lokal juga dapat membantu meningkatkan citra masyarakat dan mengandalkan produk UMKM. Dengan citra yang positif, UMKM dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produknya. Dalam hal ini, Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM juga tidak membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM di RW 07, sebab komunitas lokal tetap mengutamakan pembangunan dan pengembangan secara mandiri (Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Wolfe, Drainoni, Klasko-Foster, Fix, Siegel, Mimiaga, Reisner, & Hughto, 2023).

Pengembangan komunitas lokal dapat melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Kerjasama ini dapat membantu UMKM untuk belajar tentang peluang bisnis dan sumber daya melalui pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM di RW 07 menerima bantuan dari pihak lain, namun tidak dengan intensitas yang tinggi. Dengan kata lain, bantuan ini masih bersifat sementara, sehingga manfaat yang diterima juga tidak berdampak signifikan. Akibat perkembangan dan kepentingannya, komunitas lokal di RW 07 tidak dapat membuat jaringan yang lebih luas untuk menerima bantuan dari pihak lain kepada UMKM RW 07 yang lebih berkelanjutan dan intensif (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016).

Bila ditinjau berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari pengembangan komunitas lokal, pengembangan komunitas lokal di RW 07 yang sesuai dengan proses pengorganisasian seharusnya ditunjukkan pula dengan adanya respon ketidakpuasan dari UMKM di RW 07 dalam menyelesaikan masalah, kemudian UMKM di RW 07 bersama masyarakat membentuk suatu komunitas lokal sebagai pengembangan gugus tugas keorganisasian dengan melibatkan pemimpin lokal. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa UMKM di RW 07 memiliki keinginan kuat dalam mengembangkan komunitas lokal, sehingga hal tersebut dapat menjadi indikasi terimplementasinya proses penguatan kapasitas. UMKM di RW 07 kemudian berkumpul dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan serta membuat rencana tindakan. Berdasarkan hasil diskusi, UMKM di RW 07 kemudian bergerak untuk melakukan serangkaian tindakan dan kemudian merefleksikan hasil tindakan tersebut sebagai acuan pada proses penyelesaian masalah di waktu yang akan datang (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016).

4.3. Komunikasi Vertikal dan Horizontal

Terbukanya akses komunikasi vertikal dan horizontal antara UMKM dengan proses pengorganisasian, diawali dengan adanya kesamaan respon ketidakpuasan pemimpin lokal dan UMKM terhadap permasalahan. Ketidakpuasan tersebut membentuk suatu aktivitas yang merumuskan pembentukan suatu wadah sesuai kebutuhan UMKM untuk menyelesaikan permasalahan. Melalui wadah ini, UMKM berusaha mencari serta mendapatkan permasalahan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, UMKM dapat menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman. UMKM kemudian melakukan tindakan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana sebelumnya serta melakukan evaluasi atas tindakan pemberian bantuan yang telah dilakukan (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Wang, Feng, Deng, Su, & Li, 2023).

Komunikasi vertikal dan horizontal penting untuk memperkuat kapasitas UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, Paguyuban UMKM di RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM melakukan komunikasi vertikal secara rutin dengan pihak pemerintah lokal seperti Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol. Paguyuban UMKM di RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM juga selalu melakukan komunikasi horizontal dengan masyarakat dan anggota komunitas lokal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM sebagai komunitas lokal dapat membantu UMKM di RW 07 mendapatkan informasi dan arahan yang jelas dari pihak pemerintah

lokal mengenai strategi dan kebijakan. Informasi ini membantu UMKM di RW 07 untuk lebih memahami kondisi dan kebutuhan pasar secara lebih luas, sehingga UMKM di RW 07 dapat memperkuat kemampuannya dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Wang, Gao, Pitts, & Dong, 2023).

Pada saat yang sama, komunikasi horizontal antara Paguyuban UMKM di RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM dengan masyarakat dan anggota komunitas lokal juga dapat membantu UMKM di RW 07 berbagi pengetahuan dan informasi yang saling mendukung bagi kegiatan operasionalnya. Dengan komunikasi horizontal yang baik, UMKM di RW 07 dapat memperkuat keterampilan dan pengetahuan tertentu dalam fungsi utamanya, seperti pemasaran, keuangan, atau teknologi. Selain itu, melalui komunikasi horizontal, UMKM di RW 07 dapat membangun hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dengan mitranya, seperti pemasok, kontraktor, atau konsumen yang membantu UMKM di RW 07 terhindar dari konflik dan menciptakan kerjasama yang menguntungkan semua pihak (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Bell, 2021; Whitaker & Tonkin, 2021).

Untuk memperkuat komunikasi vertikal dan horizontal, UMKM di RW 07 dapat mengambil berbagai langkah, seperti meningkatkan keterampilan komunikasi anggota, meningkatkan saluran komunikasi internal, dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa jika komunikasi vertikal dan horizontal yang mereka lakukan dapat diperkuat, maka UMKM di RW 07 akan lebih efektif dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di pasar yang kompetitif (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Dutta, 2021; Liang & Zhong, 2023).

4.4. Dukungan Pihak Luar

Aspek terakhir dari penguatan kapasitas yaitu terbukanya hubungan UMKM dengan pihak luar yang ditandai dengan kesetupaduan pemimpin lokal dalam membentuk komunitas lokal yang juga dapat berperan sebagai gugus tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini, pemimpin lokal dapat mengajak UMKM di RW 07 dan pihak luar untuk senantiasa mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Sebagai langkah awal, UMKM di RW 07 bersama pihak luar mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu dan membentuk serangkaian rencana tindakan (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Berwick, Bowman, & Matney, 2022).

Kemudian, UMKM di RW 07 dan pihak luar dapat mengimplementasi rencana tindakan tersebut dalam bentuk pemberian bantuan berupa sembako, pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta dana yang dibutuhkan. Bentuk dukungan pihak luar tersebut dapat mendukung pengembangan struktur dan berimplikasi terhadap implementasi jangka panjang melalui pengembangan kemampuan yang telah dilaksanakan. Namun, hal ini juga berpotensi membuat UMKM di RW 07 menjadi ketergantungan, sebab belum dilaksanakannya proses refleksi dan evaluasi terkait bantuan yang diberikan oleh pihak luar (Lindeman, 1995; Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016).

Penguatan kapasitas UMKM sangat penting sebagai upaya peningkatan daya saing dan ketahanan persaingan. Secara umum, dukungan dapat diberikan oleh beberapa pihak, baik pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM di RW 07 juga telah mendapatkan berbagai bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah lokal, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat. Dukungan dari berbagai pihak tersebut telah mempengaruhi UMKM di RW 07, antara lain pengembangan keterampilan dan pengetahuan usaha sehingga UMKM di RW 07 dapat meningkatkan kualitas produk, peningkatan pemasaran, dan pengoptimalan dalam memanfaatkan teknologi (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Lu, Cheng, Xiao, Li, Li, Zhao, Lu, Zhao, & Yao, 2023).

Dukungan dari berbagai pihak juga membuka peluang bagi UMKM di RW 07 untuk berjejaring dengan berbagai perusahaan dan menjalin kemitraan strategis dengan UMKM di wilayah lain,

sehingga UMKM di RW 07 dapat memperluas jaringan dan meningkatkan akses pasar. Dukungan ini juga berpotensi membentuk reputasi yang baik bagi UMKM di RW 07. Meski tidak signifikan, tetapi UMKM di RW 07 menjadi lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra usaha. Selain itu, adanya peningkatan reputasi, UMKM di RW 07 juga dapat meningkatkan skala bisnis, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga dapat membantu UMKM di RW 07 dalam mengembangkan kapasitasnya, sehingga mampu bersaing secara efektif. Namun, penting pula bagi UMKM di RW 07 untuk selalu mencari informasi, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, dan mengembangkan kemampuan sendiri sehingga dapat bertumbuh secara mandiri dan berkelanjutan (Suriadi, 2005; Beckwith & Lopez, 2011; Pyles, 2007; Pyles, 2015; Pyles, 2016; Campbell, Howie, Moussa, Mason, & Joyce, 2023; Khalid, O'Brien, Walsh, Chowdhury, & Turin, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah penguatan kapasitas UMKM di RW 07 perlu didukung oleh peran pemimpin lokal. Pemimpin lokal yang ada di RW 07 seperti Ketua RT, Ketua RW 07, Ketua Paguyuban UMKM RW 07, Ketua Kelurahan Ciateul, dan Ketua Kecamatan Regol perlu mengimplementasikan perannya dengan optimal, sehingga hal tersebut berpotensi membantu UMKM di RW 07 memiliki kapasitas yang kuat. Hal ini dapat ditinjau dari belum optimalnya dorongan pertumbuhan UMKM di RW 07 sebagai upaya pemimpin lokal untuk memfasilitasi aksesibilitas UMKM di RW 07 terhadap permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi serta stabilitas finansial. Namun, pemimpin lokal berupaya menciptakan lingkungan operasional yang kondusif bagi UMKM di RW 07. Meskipun tidak dilakukan secara rutin, tetapi pemimpin lokal mulai berupaya untuk membuka aksesibilitas pelayanan publik. Pemimpin lokal juga berupaya memberikan pelatihan dan mendukung pengembangan keterampilan bagi UMKM di RW 07 dan anggotanya serta berupaya menciptakan jaringan yang berkelanjutan untuk menghubungkan UMKM di RW 07 dengan produsen, pemasar, serta rekan bisnis lokal.

Kemudian, pengembangan komunitas lokal di RW 07 seperti Paguyuban UMKM RW 07, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Posyandu, dan DKM belum terimplementasi dengan baik dan optimal. Hal ini terlihat dari adanya komunitas lokal yang masih berfokus pada pengembangan dan menjalankan perannya masing-masing. Segmentasi yang terjadi berimplikasi pada terhambatnya proses penguatan kapasitas UMKM di RW 07. Jika pengembangan komunitas lokal tidak optimal, maka akan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya asing atau pihak luar. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan hak kepemilikan atas sumber daya lokal. Selain itu, pengembangan komunitas lokal yang tidak optimal dapat memicu konflik antar masyarakat, khususnya hal ini terjadi jika pihak luar cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan UMKM di RW 07 dan memperlebar kesenjangan sosial, sehingga memunculkan masalah kemiskinan dan ketimpangan. Kemudian, menghilangkan kesempatan UMKM di RW 07 untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitasnya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap pembangunan lokal.

Selanjutnya, komunikasi vertikal dan horizontal yang telah dilakukan dengan optimal memberikan akses informasi yang lebih luas dan akurat bagi kebutuhan penguatan kapasitas UMKM di RW 07 seperti peluang pasar, strategi pemasaran, dan pelatihan. Hal ini dapat terlihat dari komunikasi vertikal dan horizontal yang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM di RW 07. Melalui pelatihan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal dan mitra bisnis, UMKM di RW 07 dapat memperoleh wawasan baru tentang manajemen usaha, pengembangan produk, serta cara mengembangkan jaringan bisnis, memperkuat kemitraan, dan jaringan bisnis. UMKM di RW 07 dapat bertemu dengan konsumen, pemasok, atau bahkan mitra bisnis yang dapat membantu dalam meningkatkan penjualan dan mengembangkan usaha. Komunikasi vertikal dan horizontal yang baik dengan para pemangku kepentingan membuat UMKM di RW 07 dapat memperoleh dukungan untuk mengembangkan bisnis mereka serta memperkuat reputasi dari

UMKM di RW 07 itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan kerjasama bisnis di waktu yang akan datang.

Dengan adanya dukungan dari pihak luar, UMKM di RW 07 dapat memperbaiki kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Negosiasi tentang teknik produksi yang lebih baik, pelatihan tenaga kerja, bahkan bahan baku dan bantuan peralatan dapat membantu UMKM di RW 07 menjadi lebih efisien dalam menjalankan usaha dan meningkatkan daya saing mereka. Dukungan pihak luar juga dapat membantu UMKM di RW 07 untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pendapatan, membantu UMKM di RW 07 untuk memperoleh modal usaha, seperti pinjaman atau investasi. Selain itu, pihak luar juga dapat membantu memberikan informasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan usaha mereka serta membantu UMKM di RW 07 beradaptasi dengan persyaratan peraturan baru. Dukungan dari pihak luar juga membantu UMKM di RW 07 untuk membangun jaringan dan kemitraan bisnis yang bisa membawa manfaat jangka panjang. Dalam hal ini, UMKM di RW 07 bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi sosial dan komunitas bisnis. Dengan adanya kemitraan, UMKM di RW 07 dapat mengeksplorasi berbagai peluang bisnis baru dan mendorong kemajuan ekonomi di wilayah mereka.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran terkait penguatan kapasitas UMKM di RW 07. Pertama, peneliti memberikan saran mengenai peran pemimpin lokal. Merujuk pada kesimpulan, pemimpin lokal harus memainkan dan meningkatkan peran aktif dalam mendorong pertumbuhan UMKM di RW 07. Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemimpin lokal adalah memberikan dukungan finansial, memfasilitasi akses ke pasar dan pelatihan keterampilan, mempromosikan produk UMKM di RW 07, dan memberikan layanan konsultasi untuk membantu pengembangan bisnis. Hal ini akan membantu permulaan UMKM di RW 07 dan pertumbuhan dan kesesuaian yang lebih baik dengan kebutuhan pasar dan masyarakat luas.

Merujuk pada kesimpulan, komunitas lokal dapat mengimplementasikan kegiatan yang dapat menguatkan kapasitas dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di RW 07. Komunitas lokal perlu menyusun rencana dan mengembangkan model pemeliharaan, pembiayaan, sistem informasi hidrologi dan membuat rekomendasi untuk memecahkan masalah, sebab perubahan kondisi lingkungan dan perkembangan terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas komunitas lokal yang bersangkutan dapat dilihat dari pengorganisasian yang diprakarsai oleh para pemimpin lokal di RW 07. Pengembangan komunitas lokal juga perlu didorong oleh ketidakpuasan UMKM di RW 07 terhadap pemecahan masalah. Oleh sebab itu, komunitas lokal harus mampu membuat UMKM di RW 07 untuk saling membantu, mengingatkan, dan bertindak sesuai prioritas permasalahan yang mereka hadapi. Dalam kegiatan membantu dan memecahkan masalah, anggota komunitas lokal dan UMKM di RW 07 dapat berkoordinasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan waktu.

Komunikasi vertikal dan horizontal dengan pemerintah lokal dan komunitas atau masyarakat secara berkesinambungan adalah kunci untuk memperkuat kapasitas UMKM di RW 07. Untuk membangun jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dengan pemerintah lokal dan komunitas atau masyarakat yang efektif dengan UMKM di RW 07, bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dan bisnis dari UMKM di RW 07 itu sendiri. Selain itu, manfaatkan teknologi seperti media sosial dan email untuk berkomunikasi menjadi pendukung lain dalam membangun komunikasi vertikal dan horizontal yang berkesinambungan. Tidak hanya itu, perlu adanya perhatian dan kepedulian pada UMKM di RW 07 untuk membangun hubungan yang baik dan membuat mereka merasa dihargai. Selanjutnya, dengan memberikan dukungan dan akses ke informasi yang diperlukan, seperti informasi tentang pasar, peluang usaha, dan pelatihan juga dapat membantu mereka meningkatkan produk dan layanan mereka, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pendapatan.

Kemudian, dukungan dari pihak luar dapat membantu penguatan kapasitas UMKM di RW 07 dan meningkatkan tingkat keberhasilan bisnis mereka. Namun, untuk memperoleh dampak positif yang signifikan, UMKM di RW 07 juga harus memanfaatkan dukungan tersebut dengan baik dan

memperhatikan kualitas produk dan layanan, manajemen bisnis, serta strategi pemasaran mereka agar tetap kompetitif di pasar. Dukungan dari berbagai pihak juga dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi UMKM di RW 07 agar dapat berjejaring dengan berbagai perusahaan dan menjalin kemitraan strategis dengan UMKM di wilayah lain, sehingga UMKM di RW 07 dapat memperluas jaringan dan meningkatkan akses pasar. Selain itu, dukungan pihak luar perlu dimanfaatkan agar UMKM RW 07 dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga diharapkan membuat UMKM di RW 07 mengembangkan kemampuan bersaing secara efektif. Namun, penting juga agar UMKM di RW 07 selalu mencari informasi, beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta mengembangkan kemampuannya untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian dan penulisan artikel ini, terutama kepada Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan penulis ilmu dan kesempatan untuk menulis artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ajibade, I. J. & Siders, A. R. (2021). *Global Views on Climate Relocation and Social Justice: Navigating Retreat*. United States: Taylor and Francis.
- Apuan, V. N. (1988). *Organizing People for Power: Some Perspectives to Community Organization*. Quezon: Claretian Publications.
- Bane, M. J.; Coffin, B.; & Thiemann, R. (2021). *Who Will Provide? The Changing Role of Religion in American Social Welfare*. United States: Taylor and Francis.
- Batsleer, J.; Rowley, H.; & Lüküslü, D. (2022). *Young People, Radical Democracy, and Community Development*. United Kingdom: Policy Press.
- Beckwith, D. & Lopez, C. (2011). Community Organizing: People Power from the Grassroots. *COMM-ORG Papers*. Retrieved February 13, 2022 (<http://comm-org.wisc.edu/papers.htm>).
- Bell, A. P. (2021). *The Music Technology Cookbook: Ready-Made Recipes for The Classroom*. Canada: Oxford University Press.
- Berwick, D.; Bowman, K.; & Matney, C. (2022). *Traumatic Brain Injury: A Roadmap for Accelerating Progress*. United States: National Academies Press.
- Campbell, P.; Howie, L.; Moussa, B.; Mason, C.; & Joyce, A. (2023). Youth Resilience and Training Programmes in Australia and the US: Beyond Neoliberal Social Therapeutics. *Journal of Youth Studies, Volume 26, No. 2*.
- Collins, C.; Dolata, J.; Pike, E.; & Sehgal, A. (2023). Increasing Research Capacity in Community Organizations: Findings from the Community Research Scholars Initiative. *Evaluation and Program Planning, Volume 96*.
- Dizon, J. (2012). Theoretical Concepts and Practice of Community Organizing. *The Journal of Public Affairs and Development, Volume 1: 89-123*.
- Dunham, A. (1965). *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. New York: Thomas Y. Crowel Company.
- Dutta, S. (2021). *Environmental Treatment Technologies for Municipal, Industrial, and Medical Wastes: Remedial Scope and Efficacy*. United States: CRC Press.
- Elshater, A. & Abusaada, H. (2023). Exploring the Types of Blogs Cited in Urban Planning Research. *Planning Practice and Research, Volume 38, No. 1*.
- Engel-Di Mauro, S. & Martin, G. (2021). *Urban Food Production for Ecosocialism: Cultivating the City*. United States: Taylor and Francis.
- Fleury, S. (2023). We for Us: Collective Action in the Favelas During the Pandemic. *Green Energy and Technology*.
- Holzer, H. J. & Lerman, R. I. (2006). *Employment Issues and Challenges in Post-Katrina New Orleans*, in M.A. Turner and S.R. Zedlewski (Eds) *After Katrina: Rebuilding Opportunity and Equity into the New New Orleans*. Washington: Urban Institute.
- Hughes, C. & Ketola, M. (2021). *Neoliberalism and the Voluntary and Community Sector in Northern Ireland*. United Kingdom: Policy Press.
- John, E. P. (2022). *Co-Learning in Higher Education: Community Wellbeing, Engaged Scholarship, and Creating Futures*. United States: Taylor and Francis.

- Khalid, A.; O'Brien, M. G.; Walsh, C.; Chowdhury, N.; & Turin, T. C. (2023). Enhancing Newcomer Research and Knowledge Mobilization through A Community-Based Knowledge Engagement Hub. *International Perspectives In Psychology: Research, Practice, Consultation, Volume 12, No. 1.*
- Leathwick, J. R. & Byrom, A. E. (2023). The Rise and Rise of Predator Control: A Panacea, or A Distraction from Conservation Goals? *New Zealand Journal of Ecology, Volume 47, No. 1.*
- Liang, Y. & Zhong, T. (2023). Impacts of Community-Level Grassroots Organizations on Household Food Security During the Covid-19 Epidemic Period in China. *International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 85.*
- Lindeman, E. (1995). *The Community*. New York: Association Press.
- Lu, Q.; Cheng, C.; Xiao, L.; Li, J.; Li, X.; Zhao, X.; Lu, Z.; Zhao, J.; & Yao, M. (2023). Food Webs Reveal Coexistence Mechanisms and Community Organization in Carnivores. *Current Biology, Volume 33, No. 4.*
- Martha, E. & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Minkler, M.; Wallerstein, N.; & Wilson, N. (2008). Improving Health through Community Organization and Community Building. *Health Behavior and Health Education, Volume 3: 287-312.*
- Murphy, P. W. & Cunningham, J. V. (2003). *Organizing for Community Controlled Development*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Oliveira, J. L.; Almeida, J. C. P.; Pauli, A. J. C.; Moitinho, M. R.; Fiorati, R. C.; & Souza, J. (2023). Psychosocial Impacts of the Covid-19 Pandemic among Settled Women: A Longitudinal Study. *Revista Latino-Americana de Enfermagem, Volume 31.*
- Pyles, L. (2007). Community Organizing for Post-Disaster Social Development: Locating Social Work. *International Social Work, Volume 50, No. 3: 321-333.*
- Pyles, L. (2015). Disaster Recovery in Post-Earthquake Rural Haiti. *Research Findings and Recommendations for Participatory, Sustainable Recovery.*
- Pyles, L. (2016). Decolonising Disaster Social Work: Environmental Justice and Community Participation. *British Journal of Social Work, Volume 47.*
- Rahm, J. & Gonsalves, A. J. (2023). Refiguring Research Stories of Science Identity by Attending to the Embodied, Affective, and Non-Human. *Frontiers in Education, Volume 8.*
- Ross, M. G. (1955). *Community Organization: Theory, Principles and Practice (1st Edition)*. New York: Harper and Row Publisher.
- Ross, M. G. (1967). *Community Organization Joanna Cotler Books: Theory, Principles, and Practice*. New York: 2nd Revised Edition.
- Rubin, H. (1986). *Community Organizing and Development*. Ohio: Merrill Publishing Company.
- Sampaio, M. F.; Ferreira, P. C.; Ludwig, T. A. V.; & Padial, A. A. (2023). Temporal Stability in Beta Diversity does not Guarantee Surrogacy or Compositional Stability in A Micro-Phytoplankton Metacommunity. *Limnetica, Volume 42, No. 1.*
- Sawyer, S.; Grieb, S. M.; Long, A.; Tilchin, C.; Clark, C.; Greenbaum, A.; & Jennings, J. M. (2023). Improving Research Dissemination to Black Sexual Minority Men: Development of A Community-Led and Theory-Based Dissemination Plan. *Health Promotion Practice, Volume 24, No. 1.*
- Siddiqui, H. Y. (1997). *Working with Communities*. New Delhi: Hira Publications.
- Sojoyner, D. M. (2022). *Joy And Pain: A Story of Black Life and Liberation in Five Albums*. California: University of California Press.
- Srivastava, A. & Kumar, N. (2023). Queueing Model based Dynamic Scalability for Containerized Cloud. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Volume 14, No. 1.*
- Suriadi, A. (2005). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Medan: Diktat Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara.
- Vandeventer, P. (2004). *From Chaos to Community: A Guide to Helping Friends and Neighbors Recover and Rebuild After a Major Disaster*. Los Angeles: Community Partners.
- Wang, K.; Feng, Y.; Deng, J.; Su, C.; & Li, Q. (2023). An Evaluation Approach of Community Emergency Management Ability Based on Cone-ANP. *International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume 20, No. 3.*
- Wang, W.; Gao, Y.; Pitts, A.; & Dong, L. (2023). A Bibliometric Analysis of Neighborhood Sense of Community. *Sustainability (Switzerland), Volume 15, No. 5.*
- Whitaker, J. & Tonkin, A. (2021). *Play for Health Across the Lifespan: Stories from the Seven Ages of Play*. United States: Taylor and Francis.
- Wolfe, H. L.; Drainoni, M. L.; Klasko-Foster, L.; Fix, G. M.; Siegel, J.; Mimiaga, M. J.; Reisner, S. L.; & Hughto, J. M. W. (2023). Structural Equation Modeling of Stigma and HIV Prevention Clinical Services Among

Transgender and Gender Diverse Adults: The Mediating Role of Substance Use and HIV Sexual Risk. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Volume 92, No. 4.*

Wright, M. T.; Rosser, B. S. R.; & Zwart, O. (2021). *New International Directions in HIV Prevention for Gay and Bisexual Men*. Germany: Taylor and Francis.

Wynia, B. K.; Dalmer, N. K.; Linden, L.; Radha, W. L.; & Gillett, J. (2023). Towards A Research Platform: Partnering for Sustainable And Impactful Research in Public Libraries. *Public Library Quarterly, Volume 42, No. 1.*

Zeren, G.; Tan, J.; Zhang, Q.; & Qiuying, B. (2023). Rebuilding Rural Community Cooperative Institutions and Their Role in Herder Adaptation to Climate Change. *Climate Policy.*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).